

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 *Agency Theory***

Teori keagenan (*Teori Agency*) menurut Saputra (2018) yakni suatu ide yang mendeskripsikan relasi antara direktur atau manajer dengan pemilik .Pada teori ini menjelaskan terdapat relasi kerja antara pemberi kuasa atau prinsipal yakni investor dan penerima wewenang atau agen yakni manajer berbentuk kontrak kolaborasi. Pemilik tidak mempunyai informasi yang cukup untuk memberi penilaian kinerja manajer, sehingga pemilik tidak merasakan kejelasan mengenai kinerja manajer pada hasil aktual perusahaan.

Dalam pembahasan mengenai hubungan antara pemilik dengan manajer diperlukan teori mengenai penentuan kontrak yang efisien. Kontrak dikatakan efisien apabila memenuhi dua hal, yakni : 1). Manajer dan pemilik harus mempunyai informasi yang simetris maksudnya baik pihak manajer maupun pemilik mempunyai mutu dan total informasi yang sama maka tak ada informasi yang disembunyikan untuk menguntungkan diri masing-masing, 2) Risiko yang ditanggung manajer, berhubungan dengan imbal jasanya yaitu kecil maksudnya manajer memiliki kejelasan tinggi tentang imbalan yang diterima olehnya. (Saputra, 2018).

Teori ini menjelaskan jika terdapat asimetri informasi, dimana manajer merupakan pelaku dalam pengelolaan perusahaan sehingga mempunyai informasi internal perusahaan yang lebih banyak daripada pemilik atau prinsipal. Akibat terdapatnya konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat memotivasi agen untuk melaporkan informasi yang tidak sesungguhnya kepada prinsipal. Tindakan agen dalam melakukan perubahan, menyembunyikan dan melakukan rekayasa terhadap nilai-nilai suatu laporan keuangan dengan mempermainkan prosedur dan metode yang dipakai perusahaan disebut dengan manajemen laba.

Hubungan sisi positif dan negatif dari konsep manajerial salah satunya terjadi dalam hubungan antara teori agensi (*agency theory*) dan manajemen laba. Manajemen laba memang merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan operasionalitas perusahaan dari pemilik (*principals*) kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik (*agents*). Konsep Manajerial yang mengatur antara pemilik dan pengelola ini menyatakan bahwa setiap pihak mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sebuah perusahaan. (Sulistyanto, 2018:29).

Hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan ini seharusnya menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme yang menguntungkan semua pihak, khususnya apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu munculnya permasalahan agensi (*agency problem*) antara pemilik dan pengelola perusahaan.

Permasalahan ini muncul karena ada pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi meskipun merugikan pihak lain. Bahkan dalam perkembangannya, permasalahan agensi juga menjadi permasalahan antara pengelola dengan pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, yaitu calon investor, kreditur, supplier, regulator, dan *stakeholder* lainnya. Permasalahan yang muncul dari keinginan manajer untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi dengan mengelabui pemilik dan *stakeholder* lain yang tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai. (Sulistyanto, 2018:30).

## **2.1.2 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Definisi Akuntansi**

Beberapa ahli dalam bidang akuntansi memberikan definisi yang berbeda-beda, namun definisi yang berbeda-beda tersebut merujuk pada inti dan tujuan yang sama, yaitu merumuskan definisi akuntansi tersebut mudah untuk dipahami.

Definisi akuntansi yang dikemukakan oleh Narsa (2019) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut.”

Akuntansi berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh (Ingga Ibrahim, 2016:9) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisisan, dan pelaporan. Akuntansi disebut sebagai

proses karena akuntansi memiliki input yang diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output.”

Menurut Sartono (2023), *American Accounting Association* mendefinisikan akuntansi adalah: “... suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Sedangkan definisi akuntansi Menurut Weygandt, et.al (2019:3) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi di atas akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan.

#### **2.1.2.2 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Rofifah & Pusoko (2021) definisi akuntansi pajak adalah: “... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Setiawan (2012:8) pengertian akuntansi perpajakan adalah: “... sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan

untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Sedangkan menurut Agoes & Trisnawati (2008) definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga akan mempermudah dalam menyusun SPT.

### **2.1.2.3 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar akuntansi perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba netto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

#### **2.1.2.4 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 Paragraf 07

(2015:2) definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Sementara itu, menurut Irham Fahmi (2015:21) pengertian laporan keuangan adalah: “... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu

perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Soemarso dalam (Suteja, 2018) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah: “... laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.”

Menurut (Kasmir, 2016) laporan keuangan adalah: “... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

#### **2.1.2.5 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 12- 14 (2015:3) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat

membuat keputusan ekonomik; keputusan ini mungkin mencakup, sebagai contoh, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

Menurut Hery (2016:5) tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

Menurut (Fahmi, 2013) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

### **2.1.2.6 Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 08 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.”



Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. “Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/ atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perusahaan ekuitas (*statement of financial position*) pada akhir periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.“

#### **2.1.2.7 Karakteristik Laporan Keuangan**

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 24-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

##### **a. Dapat Dipahami**

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

##### **b. Relevan**

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

1. Materialitas

Informasi di pandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

### c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan. 1. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

#### 2. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

#### 3. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

#### 4. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

#### 5. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

### d. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan

antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

**e. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

4. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

### **2.1.3 Ruang Lingkup Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam (Siti Resmi, 2017) yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Suandy (2016:1) dari segi ekonomi, pajak merupakan: “... pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.”

Pengertian pajak menurut Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, Horace R. Brock dan Moh. Zain (2005) dalam (Rahayu, 2020:26) :

*“Tax is any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”*

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

### 2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Agus Sambodo (2015:7) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 4 (empat) fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi Penerimaan (Budgetair), menurut teori ini dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkattingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi social, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan social di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.
3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat , pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang mudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan m=dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

### 2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) di Indonesia sendiri Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. “Sistem Official Assessment Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem Self Assessment Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem Withholding Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

### 2.1.3.4 Jenis Pajak

Menurut Rahayu (2020:57-58) jenis pajak menurut golongan dapat dijelaskan perbedaannya antara pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. “Pajak Langsung

Apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (*no tax shifting*), maka pajak tersebut digolongkan sebagai pajak langsung. Karena tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan tersebut (*tax Incidence*). Dalam hal ini pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk menanggung pajak (destinataris) sudah jelas, yaitu karena seseorang atau badan tersebut memiliki sesuatu yang

melekat kepada orang atau badan, bukan pada sesuatunya. Pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasar atas surat ketetapan (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Digolongkan ke dalam pajak tidak langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang atau badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Akibat dari pengalihan atau pelimpahan tersebut maka *tax incidence* pada akhirnya dibebankan sebagian atau seluruhnya pada pihak lain. Pajak yang masuk ke dalam golongan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas kohir dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, misalnya dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu yang menyertainya.”

Penggolongan pajak subyektif dan obyektif merupakan pajak yang dilihat dari eratnya sifat atau hubungan dengan subyek atau obyek pajaknya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rahayu (2020:58-59) yaitu :

### 1. “Pajak Subyektif

Pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan dari subyek pajak maka digolongkan kedalam pajak subyektif. Pajak ini memberikan focus perhatian pada keadaan wajib pajak, sehingga pada saat menetapkan pajaknya maka diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan wajib pajak.

### 2. Pajak Obyektif

Apabila pajak erat hubungannya dengan obyek pajak maka digolongkan kedalam pajak obyektif. Besarnya jumlah pajak ditentukan pada keadaan obyek dan tidak dipengaruhi sama sekali oleh keadaan subyek pajak. Obyek dapat berupa sesuatu, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditentukan selanjutnya subyek pajak yang memiliki hukum tertentu hubungan dengan

obyek pajak tersebut agar dapat ditunjuk siapa sebagai subyek pajak tersebut”.

Jenis pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

#### **2.1.3.5 Pajak Tangguhan**

Menurut Waluyo (2010:282) mendefinisikan pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih (neto) sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau mamfaat pajak tangguhan”.

Menurut Suandy (2016:99) menyatakan bahwa pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.



Menurut Murhaban (2015:66) menyatakan bahwa pajak tangguhan sebagai berikut :

“Pajak tangguhan adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang”.

Dari pengertian menurut para ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang berasal dari perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak akibat perbedaan temporer.

#### **2.1.4 Aset Pajak Tangguhan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Aset Pajak Tangguhan**

Menurut PSAK No.46 aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

“Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangi, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan.”

Menurut Waluyo (2008:217), aset pajak tangguhan adalah: “... aktiva yang terjadi apabila terjadi perbedaan waktu yang menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak di undang-undang pajak.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), aset pajak tangguhan adalah: “... jumlah pajak terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat

adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian.”

Dari pengertian aset pajak tangguhan diatas dapat disimpulkan bahwa aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang kemungkinan dapat terpulihkan akibat selisih temporer yang menyebabkan pajak yang dibebankan lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut undang-undang pajak.

#### **2.1.4.2 Faktor Penyebab Aset Pajak Tangguhan**

Menurut D. Christine (2019) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan terjadi manakala ada koreksi positif, ini karena perbedaan waktu yang menyebabkan beban pajak secara pajak lebih besar daripada secara komersial.

Menurut Arsyad & Natsir (2022:69) Pajak yang ditangguhkan adalah ”... jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan. Jumlah PPh yang dapat dipulihkan ini timbul karena adanya akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, perbedaan temporer yang belum dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai aturan perpajakan.”

Aset pajak tangguhan terjadi karena adanya koreksi positif yang mengakibatkan laba menurut perusahaan atau laba komersial lebih kecil dibandingkan dengan laba menurut fiskal. Sehingga perusahaan membayar pajak periode tertentu lebih besar daripada pembayaran pajak periode mendatang. Karena pembayaran pajak periode mendatang lebih kecil atau lebih hemat berarti laba perusahaan yang dilaporkan akan menjadi lebih besar. Semakin tinggi nilai dari aset

pajak tangguhan maka peluang tindakan manajemen laba semakin besar Rahma (2020). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai.

Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan (Sutadipraja & Mardiana, 2019:154).

#### **2.1.4.3 Pengukuran Aset Pajak Tangguhan**

##### **A. DTA Ratio**

Dalam penelitian ini Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) diukur dengan rasio akuntansi menurut GMT Research yang diperoleh dari saldo Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) tahun t dibagi dengan sales (penjualan) tahun t.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$DTA_{ratio} = \frac{Deferred\ Tax\ Asset}{Sales}$$

(GMT Research)

Aktiva/aset pajak tangguhan sebagai efek dari pajak penghasilan masa depan diakibatkan perbedaan waktu antara akuntansi dan perlakuan pajak, dan kemungkinan kerugian pajak dapat berlipat ganda di masa mendatang (Timuriana et al., 2015).

### **B. APT<sub>it</sub>**

Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo, 2008:217)

Aktiva pajak tangguhan adalah selisih antara pajak tangguhan pada periode sekarang dengan periode yang telah lalu. Aktiva pajak dapat diukur dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t dibagi dengan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t-1. Hal ini dirumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Waluyo (2008:217).

$$APT_{it} = \frac{\Delta \text{Aktiva Pajak Tangguhan}_{it}}{\text{Aktiva Pajak Tangguhan}_{t-1}}$$

## 2.1.5 Perencanaan Pajak

### 2.1.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak menurut Pohan (2013:13) adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Menurut Suandy (2016:7) menyatakan bahwa: “... perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk menimbulkan kewajiban pajak.”

Menurut Wild, et.all (2004) dalam Aditama & Purwaningsih (2014) menjelaskan bahwa:

“... Perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak dengan cara merekayasa laporan keuangan agar dapat ditekan serendah mungkin. Variabel perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yaitu dimana menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan pada tahun berjalan.”

Dari berbagai definisi perencanaan pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan rencana yang dirancang dan dijalankan oleh perusahaan dengan tujuan menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh

perusahaan hingga ketitik terendah tanpa melakukan tindakan kecurangan yang dapat menjadi tindak pidana.

#### **2.1.5.2 Manfaat Perencanaan Pajak**

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Sebagaimana disebutkan dalam Pohan (2013:20) sebagai berikut:

1. “Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*Cash Flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat”.

#### **2.1.5.3 Tujuan Perencanaan Pajak**

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2016:8).

Pohan (2016) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
  - 1) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrative maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukuman kurungan atau penjara
  - 2) melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

#### 2.1.5.4 Persyaratan Perencanaan Pajak

*Tax Management/ Tax Planning* yang baik menurut Pohan (2013:21-22)

mensyaratkan beberapa hal antara lain yaitu:

1. “Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.”
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*). Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, invoice, faktur pajak, *PO*, dan *DO*). Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order (PO)* dari pelanggan, bukti penyerahan barang/ jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).”

### 2.1.5.5 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:12) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. “Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*) Kebijakan perpajakan merupakan alternative bagi berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.
2. Undang – undang perpajakan (*Tax Law*) Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang.”

### 2.1.5.6 Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen menurut Pohan (2016) antara lain :



a. *Tax Saving*

*Tax saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

b. *Avoidance*

*Tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

c. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.

e. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar

Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan

pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

f. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

### **2.1.5.7 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Menurut Suandy (2016:15-29), agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

#### **A. Menganalisis Informasi (Basis Data) yang Ada**

Menurut Suandy (2016:15-23) tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-

pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, berdasarkan Suandy (2016:15-23) seorang manager perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu:

1. “Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Sebagai contoh, ruang lingkup kegiatan tergolong penjualan sebagai produksinya objek pengenaan harus diidentifikasi pajak penjualan apakah barang suatu mewah produk atau tidak yang akan dijual

2. Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang berkaitan penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor berikut ini:

- a. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- b. Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan, baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan

3. Faktor nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain sebagai berikut.

- a. Masalah badan hukum.
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c. Masalah pengawasan devisa.
- d. Masalah program insentif investasi.
- e. Masalah faktor nonpajak lainnya.”

**B. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak.**

Menurut Suandy (2016:24-26) Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut ini:

1. “Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan,

proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

2. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi

residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negaranegara yang berbeda. Dalam menguji

keunggulannya, yang harus diperhatikan tidak hanya pertimbangan bisnis, tetapi juga keunggulan pengenaan pajaknya. Sebagai contoh, dalam memutuskan antara penawaran untuk memiliki saham perusahaan di berbagai negara, pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhitungkan sebagai berikut.

- a. Tarif yang dikenakan atas laba perusahaan di negara investasi.
- b. Apakah dividen yang dibagikan terutang *withholding taxes*. Jika ya, berapa tarifnya.
- c. Apakah ada kredit pajak atau pengurangan pajak lainnya di negara domisili dari pemegang saham sehubungan dengan pajak yang dibayar di negara investasi.

Dalam pembentukan anak perusahaan, faktor pajak dan nonpajak harus dibandingkan secara lebih luas. Mungkin diperlukan pula perhitungan pajak penjualan atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN secara umum adalah pajak atas konsumsi yang dikenakan sehubungan dengan:

- a. Penyerahan barang
- b. Sewa atau jasa
- c. Impor barang.

Dalam hal penyerahan barang dan jasa, jumlah pajak total ditagih dalam pembayaran yang berbeda dari berbagai individu yang terlibat, dengan dasar nilai yang ditambahkan dari mereka (individu). Dalam hal impor, pajak yang dikenakan dasarnya adalah nilai dari barang yang diimpor atau pengembalian (*refund*) dari PPN yang sudah dibayar atas barang dan jasa yang diekspor tersebut.

3. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

Dalam banyak kasus pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi, maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh

penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam basis data.”

### **C. Evaluasi atas Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2016:26-28) perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut.

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

Dari ketiga hipotesis di atas akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

### **D. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak**

Menurut Suandy (2016:28) untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai

bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/ perundang-undangan.

Tindakan perubahan, (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

#### **E. Memutakhirkan Rencana Pajak**

Menurut Suandy (2016:28) meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetapi perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Namun sayangnya, informasi mengenai perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas bisnis sering kali sangat terbatas.

Oleh karena itu, ketika memberikan masukan kepada konsulen luar negeri terkait dengan rencana perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam undang-undang dan pelaksanaannya, juga harus ditanyakan mengenai dampaknya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

#### **2.1.5.8 Pengukuran Perencanaan Pajak**

Menurut Hery (2013:4) terdapat beberapa cara pengukuran perencanaan pajak, diantaranya:

1. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek. Menurut Dyreng, et.al (2008:66) *Cash ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran pajak menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan Pengukuran penghindaran pajak berdasarkan model GAAP ETR. Perhitungan *Cash Effective tax Rate* (*Cash ETR*) menggunakan model yang dikembangkan oleh Dyreng, et.al (2008:67) yaitu sebagai berikut:

$$Cash\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{i,t}}{Pretax\ Income_{i,t}}$$

## 2. *Effective Tax Rate*

*Effective Tax Rate (ETR)* merupakan pembagian beban pajak kini atau beban pajak dengan laba sebelum pajak (Yulianti dan Finatarian, 2021:707). Rasio *ETR* ini adalah salah satu media pengukuran kemampuan perusahaan dalam perencanaan pajak. Penggunaan *ETR* diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. *ETR* dapat dirumuskan sebagai mana dikatakan oleh Yulianti dan Finatarian (2021:707) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 3. *Book tax difference*

Book-tax difference merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam konteks akuntansi perpajakan perbedaan tersebut menimbulkan dua jenis beda yaitu beda tetap (*permanent difference*) dan beda waktu (*temporary differences*). Perbedaan permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam salah satu ukuran lama, tetapi tidak dimasukkan dalam ukuran laba yang lain. Dengan kata lain, jika suatu item termasuk dalam ukuran laba akuntansi, maka item tersebut tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan sebaliknya. Perhitungan *book tax difference* sebagai perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba bersih dengan skala total asset. *Book tax*



*difference* diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan prosedur menurut Rusydi & Martani (2014:6), yaitu sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{Total Differences Book} - \text{tax}_{i,t}}{\text{Total Asset}_{i,t}}$$

#### 4. TAXPLAN<sub>it</sub>

TAXPLAN digunakan untuk menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan (Yin & Cheng, 2004).

$$TAXPLAN_{it} = \frac{\sum_t^{t-2} [PTI * 28\% - \text{Current portion of total tax expense}]: \exists}{\text{Ending Asset}_{it}}$$

### 2.1.6 Arus Kas Bebas

#### 2.1.6.1 Pengertian Arus Kas Bebas

Menurut (Kieso, et.al 2018:265) menyatakan arus kas bebas merupakan: "... total kas diskresioner yang digunakan untuk membayar hutang, memperbanyak likuiditas dan membeli saham atau investasi tambahan."

Menurut Kusdianto & Guinan (2010:131), arus kas bebas (*free cash flow*) adalah: "... ukuran kinerja keuangan yang dihitung sebagai aliran kas operasional dikurangi belanja modal. Arus kas bebas menggambarkan kas yang mampu dihasilkan perusahaan setelah mengeluarkan sejumlah uang untuk menjaga atau mengembangkan asetnya".

Menurut Agus Sartono (2012:101), menyatakan bahwa aliran kas bebas (*free cash flow*) adalah: "... *cash flow* yang tersedia untuk dibagikan kepada para investor setelah perusahaan melakukan investasi pada *fixed asset* dan *working capital* yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya".

Adapun menurut Keown dkk. (2018:47) yang dialihbahasakan oleh Widodo arus kas bebas adalah jumlah uang tunai yang tersedia dari operasi setelah investasi modal kerja operasional bersih dan aktiva tetap. Uang tunai ini tersedia untuk didistribusikan kepada pemilik perusahaan dan kreditor.

Berdasarkan uraian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa free cash flow atau arus kas bebas merupakan jumlah dana kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada para investor perusahaan, yang berasal dari operasi setelah investasi modal kerja operasional bersih dan aktiva tetap.

#### **2.1.6.2 Pentingnya Arus Kas Bebas**

Arus kas bebas yang dimiliki perusahaan sangat penting ketersediaannya untuk dapat didistribusikan kepada para pemegang saham (investor). Sebagaimana disampaikan oleh Brealey dkk. (2017:94) bahwa arus kas bebas dapat bernilai positif atau negatif sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan.

Atas dasar pemahaman tersebut Brealey, et.al (2017:96) pentingnya pertumbuhan perusahaan berdampak pada keputusan manajemen untuk melakukan pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

*“Stock repurchases as an alternative to cash dividends. If repurchases are important, it’s often simpler to value total free cash flow than dividend per share. Suppose that company decides not to pay cash dividends. Instead it will pay out all free cash flow by repurchasing shares. The market capitalization of the company should not change, because shareholders as a group will still receive all free cash flow.”*

Sementara itu, Subramanyam (2017:20) yang dialihbahasakan oleh Maulana mengenai arus kas bebas positif adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan tergantung pada ketersediaan arus kas bebas. Jumlah pengeluaran modal yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif biasanya tidak diungkapkan. Sebaliknya, jumlah pengeluaran modal tersebut sebagai bagian dari total pengeluaran modal yang diungkapkan, tetapi dapat mencakup pengeluaran untuk ekspansi kapasitas produktif. Pemisahan pengeluaran modal antara dua komponen tersebut sangat rumit. Laporan arus kas tidak memisahkan pengeluaran modal menjadi komponen pemeliharaan dan perluasan.”

Adapun Keown dkk. (2018:47) yang dialihbahasakan oleh Widodo mengenai arus kas bebas dapat menghasilkan arus positif dan negatif adalah sebagai berikut:

“Arus kas positif, ketika perusahaan memiliki sisa dari arus kas setelah perusahaan membayarkan semua beban operasi dan melakukan semua investasi-investasinya sehingga dapat didistribusikan kepada para pemegang saham dan para kreditor. Sementara itu, jika arus kas negatif, investor dan kreditor adalah satu-satunya yang harus menutupinya. Jadi, arus kas yang dihasilkan melalui suatu operasi perusahaan dan investasi dalam aset sama dengan arus kas yang dibayarkan kepada atau dari para pemegang saham dan kreditor.”

Pendapat lain disampaikan oleh Brigham dan Houston (2018:94) yang dialihbahasakan oleh Sallama dan Kusumastuti adalah sebagai berikut:

“Arus kas bebas positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan dana internal yang lebih cukup untuk membiayai investasi perusahaan saat ini dalam aset tetap dan modal kerja. Sebaliknya, arus kas negatif menandakan bahwa perusahaan tidak mempunyai cukup dana internal untuk membiayai investasi dalam aset tetap dan modal kerja, sehingga perusahaan harus memperoleh dana di pasar modal untuk membayar investasi tersebut.”

Pendapat lain disampaikan oleh Brigham dan Ehrhardt (2017:77) pentingnya *free cash flow* dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah sebagai berikut:

*“Free cash flow is the amount of cash available for distribution to investors; so the fundamental value of a company to its investors depends on the present value of its expected future FCFs, discounted at company’s weighted average cost of capital.”*

Adapun Brigham & Michael C. Ehrhardt (2017:78), menambahkan bahwa pentingnya *free cash flow* juga dapat mempengaruhi tingkat pengembalian atas modal investasi (*the return on invested capital*) adalah sebagai berikut:

*“Free cash flow has such a big impact on value, managers and investors can use FCF and its components to measure a company’s performance. Even though company had a positive NOPAT, its very high investment in operating assets caused a negative FCF. It’s a bad sign if FCF is negative because NOPAT negative, which probably means the companies have experiencing, operating problems. However, many high-growth companies have positive NOPAT but negative FCF because they are making large investments in operating assets to support growth.”*

Berdasarkan uraian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa arus kas bebas yang menghasilkan arus kas, baik positif maupun negatif memiliki peranan penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan, di mana dapat mempengaruhi

aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan dan kondisi tersebut juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang.

### **2.1.6.3 Manfaat Arus Kas Bebas**

Menurut White, et.al (2003:68) dalam (Z. Y. Putra, 2017) Semakin besar *free cash flow* yang tersedia dalam perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran utang, dan deviden. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya *free cash flow* antara lain:

1. Semakin tinggi *free cash flow* menggambarkan perusahaan semakin sehat, karena memiliki kas yang tersedia untuk pengaruh *free cash flow*, profitabilitas dan ukuran pertumbuhan, pembayaran utang dan deviden.
2. Perusahaan memiliki kesempatan yang luas untuk menangkap peluang investasi.
3. Menunjukkan kepada investor bahwa deviden yang dibagikan tidak sekedar strategi menyiasati pasar dengan maksud menaikkan nilai perusahaan.
4. Adanya *free cash flow* akan menandakan kepada pasar bahwa perusahaan mempunyai kemampuan di masa depan.
5. Arus kas bebas dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sementara itu, Subramanyam (2017:21) yang dialihbahasakan oleh Maulana arus kas bebas serupa dengan arus kas sebagai validator, di mana memberikan petunjuk penting mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Fisibilitas/kelayakan pembiayaan pengeluaran modal.
2. Sumber kas untuk ekspansi pembiayaan.
3. Ketergantungan pada pembiayaan eksternal (liabilitas versus ekuitas).
4. Kebijakan dividen di masa depan.
5. Kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang.
6. Fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi.
7. Praktik keuangan oleh manajemen.
8. Kualitas laba.

#### **2.1.6.4 Elemen – Elemen Arus Kas Bebas**

Menurut (Harahap, 2011:260) elemen-elemen dalam laporan arus kas bebas sebagai berikut:

1. Kegiatan operasi perusahaan (*Operating*) Yang termasuk kedalam kelompok kegiatan operasi perusahaan adalah pendapatan dari penghasilan utama perusahaan dan kegiatan lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, serta seluruh peristiwa lain yang tidak termasuk kegiatan investasi atau pendanaan.. Kegiatan ini mencakup: pengiriman barang, pemberian servis, dan kegiatan produksi. Arus kas dari operasi umumnya adalah pengaruh kas dari transaksi maupun peristiwa lainnya yang ikut dalam menentukan laba.

Contoh arus kas dari kegiatan operasi:

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa termasuk penerimaan dan piutang akibat penjualan, baik jangka panjang atau jangka pendek.
- b. Penerimaan dari bunga pinjaman atas penerimaan dari surat berharga lainnya seperti bunga atau dividen.

Contoh arus kas keluar dari kegiatan operasi:

- a. Pembayaran kas untuk membeli bahan yang akan digunakan untuk produksi atau untuk dijual, termasuk pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang kepada supplier barang tadi.

- b. Pembayaran kas kepada supplier lain dan pegawai untuk kegiatan selain produksi barang dan jasa.
2. Arus kas dari kegiatan pembiayaan/pendanaan (Financing) Yang termasuk kedalam arus kas dari kegiatan pembiayaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah, komposisi modal serta pinjaman jangka panjang perusahaan yang berupa kegiatan untuk mendapatkan sumber-sumber dana dari pemilik dengan cara memberikan prospek penghasilan, meminjamkan dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar hutang tertentu. Semua transaksi yang mempengaruhi pos utang termasuk berjangka pendek merupakan arus kas dari kegiatan pembiayaan.
3. Arus kas dari kegiatan investasi Yang termasuk kedalam arus kas dari kegiatan investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas yaitu menerima dan menagih pinjaman, utang, surat berharga atau modal, aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 elemen arus kas bebas yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan pembiayaan/pendanaan dan arus kas dari kegiatan investasi.

#### 2.1.6.5 Pengukuran Arus Kas Bebas

Menurut Guinan (2010: 101), *free cash flow* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Free Cash Flow} = \text{Arus Kas Operasi} - \text{Belanja Modal}}$$

Menurut Agus Sartono (2012: 102), arus kas bebas atau *free cash flow* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Free Cash Flow} = \text{Aliran Kas Operasi} - \text{Investasi Bruto Pada Modal Bersih}}$$

Menurut Keown, et.al yang dialihbahasakan oleh Widodo (2010: 47), *free cash flow* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Arus Kas Bebas} = \text{Arus Kas Setelah Pajak} - \text{Investasi Pada Aktiva}$$

Sedangkan menurut Kieso & Weygandt (2011:212), *free cash flow* diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Free Cash Flow} = \text{Net Cash Provided} - \text{Capital expenditure} - \text{Dividends}$$

## 2.1.7 Manajemen Laba

### 2.1.7.1 Pengertian Manajemen

Menurut (Afandi, 2018:1) definisi manajemen adalah sebagai berikut:

“Proses kerja sama antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif.”

Menurut (Malayu S.P Hasibuan, 2016:9) mengemukakan bahwa manajemen laba adalah: “... ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Dari definisi diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengarahkan dan



mengawasi segala aktivitas kerja agar mencapai hasil yang diinginkan dan bertujuan untuk pencapaian visi dan misi bersama.

#### **2.1.7.2 Pengertian Laba**

Menurut (PSAK No.46, 2018) yaitu laba akuntansi adalah laba bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Menurut (Ardhianto, 2019:100) “Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau *net earning*.”

#### **2.1.7.3 Pengertian Manajemen Laba**

Manajemen laba menurut (Sulistyanto, 2018, p. 4) merupakan: “... upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.”

Menurut Achyani & Lestari (2019) menjelaskan manajemen laba merupakan: “... pemilihan kebijakan akuntansi yang dapat dilakukan oleh manajer dari standar akuntansi yang sudah ada dan dapat digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan utilitas mereka.”

Menurut Natalia Wijaya & Hendriyeni (2021) menyatakan bahwa manajemen laba (*earnings management*) merupakan: “... suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa

memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (*economic advantage*) yang sesungguhnya tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang seharusnya.”

Menurut Putra (2019) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan: “... sesuatu yang dijalankan oleh manajer yang ada pada suatu perusahaan pada saat melaporkan laba yang didapatkan oleh perusahaan, hal ini digunakan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi manajer tersebut ataupun perusahaan, hal ini di didasarkan dengan kebijakan metode akuntansi yang berlaku.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah suatu penyusunan laporan keuangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen yang ditunjukkan kepada pihak eksternal dengan cara memeratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya dan untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

#### **2.1.7.4 Motivasi Manajemen Laba**

Secara konseptual ada tiga jenis hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2018:55):

1. “Bonus plan hypothesis Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial.

2. *Debt (equity) hypothesis* Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara hutang dan ekuitas lebih besar cenderung akan memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa manajer cenderung melanggar perjanjian hutang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya.
3. *Political cost hypothesis* Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mengecilkan atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya”.

#### 2.1.7.5 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut (Scott, 2015:447) adalah sebagai berikut:

1. *“Taking a bath*  
Pola ini biasanya terjadi pada periode dimana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi (*organization stress*) atau melakukan restrukturisasi. Pola taking a bath adalah praktik manajemen laba dengan menghapus asset-aset yang menimbulkan biaya di masa depan. Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi atau sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan. Pada perusahaan yang baru mengalami pergantian pimpinan perusahaan, jika perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sehingga harus melaporkan kerugian, manajer baru cenderung bersemangat melaporkan kerugian dalam jumlah yang sangat ekstrem agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target.
2. *Income minimization*  
Manajemen laba dilakukan dengan penghapusan asset kapital dan asset tak berwujud, serta membebaskan pengeluaran R&D. salah satu pertimbangan dalam menurunkan laba adalah peraturan pajak dan motivasi public. Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Secara praktis, pola ini relative sering dilakukan

dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui penghapusan asset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. Hal ini juga dilakukan untuk motivasi politis. Agar tidak menjadi pusat perhatian yang akan menimbulkan biaya politis yang tinggi, manajer seringkali memilih untuk melaporkan laba yang rendah dari laba yang seharusnya. Demi menjaga konsistensi bantuan, subsidi, atau risiko diprivatisasi, manajer cenderung menurunkan laba karena khawatir jika kinerja baik, sahamnya akan dijual atau tidak mendapatkan bantuan.

### 3. *Income maximation*

Praktik manajemen laba ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan perolehan bonus dan menghindari risiko pelanggaran perjanjian utang. Pemberian bonus berdasarkan besarnya laba akan mendorong manajer untuk memaksimalkan laba. Pola ini merupakan kebalikan dari pola *income minimization*. Menurut pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang dilakukannya beragam, mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Pola ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat kepercayaan dari kreditor. Hampir semua perusahaan *go public* meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka.

### 4. *Income smoothing*

Ada berbagai alasan yang mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba ini. Dilihat dari segi kompensasi, manajer yang tidak menyukai risiko mungkin melakukan *income smoothing* untuk mendapatkan kompensasi yang relative konstan. Dilihat dari segi perjanjian utang, *income smoothing* dilakukan untuk mengurangi ketidakstabilan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap perjanjian utang. Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan relative stabil. Untuk investor dan kreditor yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia keuangan, fluktuasi harga saham atau fluktuasi laba merupakan indikator risiko. Demi menjaga agar laba tidak fluktuatif stabilitasnya harus dijaga. Stabilitas laba ini dapat diperoleh dengan mengombinasikan dua pola tersebut, yaitu meminimalkan atau memaksimalkan laba. Namun, tentunya harus mengikuti tren laba yang akan dilaporkan agar terlihat stabil. *Income smoothing* dapat dikatakan

merupakan upaya untuk menetralkan keadaan lingkungan uang yang penuh dengan ketidakpastian.”

#### 2.1.7.6 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2018:30) ada empat cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba, yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapat periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada pendapatan sesungguhnya.
2. Mencatat pendapatan palsu Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada pendapatan sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang, yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapanpun. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.
3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat Upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.

4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban Upaya ini dapat dilakukan manajer menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya, sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Sebagai contoh adalah kewajiban berupa hutang yang disembunyikan perusahaan. Menurunnya kewajiban berupa hutang ini akan membuat biaya bunga periode berjalan menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya, sehingga laba periode berjalan pun akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya.”

#### 2.1.7.7 Pendekatan Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dilakukan dengan menggunakan pendekatan accrual. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (*accrual based measures*) dalam mendeteksi adanya manipulasi.

Ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2018:185) yaitu:

1. “Model berbasis *aggregate accrual model* pertama merupakan model yang berbasis aggregate accrual, yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba.
2. Model berbasis *specific accruals model* kedua merupakan model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industry asuransi.
3. Model berbasis *distribution of earnings after management* Sementara model *distribution of earnings* dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar benchmark yang dipakai,

misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah incidence jumlah yang berada di atas maupun di bawah benchmark telah didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat.”

### 2.1.7.8 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2018:189) model empiris untuk mendeteksi manajemen laba terdapat empat model yaitu Model Healy, Model De Angelo, Model Jones dan Model Jones Dimodifikasi. Manajemen laba diukur dengan *discretionary accrual* (DAC), sebelum mengukur discretionary accrual (DAC) perlu diketahui nilai total akrual terlebih dahulu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan *discretionary accruals* (DAC) dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. “Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (TAC) yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

Langkah I : Mengitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income + Cash\ Flows\ From\ Operations$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_{it} = \frac{\sum TA}{T}$$

Keterangan :

NDA= *Nondiscretionary Accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1.

T = 1, 2, .....T merupakan tahun subscript untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

T = Tahun subscript yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi

Langkah III : Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

## 2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operations$$

Langkah II : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_t - 1$$

Dimana :

$NDA_t$  = *Discretionary accruals* yang diestimasi

$TAC_t$  = Total akrual periode t

$TAt-1$  = Total aktiva periode t-1

## 3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991) ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.



$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operations$$

Langkah II: Dari persamaan regresi diatas, NDA (*non discretionary*) dapat dihitung dengan memasukan kembali koefisien-koefisien beta ( yaitu sebagai berikut:

Nilai Total *accruals* diestimasi dengan menggunakan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Keterangan:

$TAC_{i,t}$  = Total akrual perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$  = Total aset untuk perusahaan I peiode t-1

$REVI,t$  = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

$PPE_{i,t}$  = Aktiva tetap perusahaan i periode t

Selain itu menghitung *nondiscretionary accruals* model (NDA) adalah sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{it} - TR_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

Keterangan:

$\Delta REV$  = Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

$PPE_{it}$  = Aktiva tetap perusahaan i periode t

$TA_{t-1}$  = Total aktiva periode t-1

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = *Firm-specific parameters*

Langkah III : Menghitung nilai *discretionary accruals* (TAC) dan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

#### 4. Model Jones Dimodifikasi

Model jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model jones untuk menentukan *discretionary accruals* Ketika discretion melebihi pendapatan.

Langkah I : Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income + Cash\ Flows\ From\ Operation$$

Langkah II : Menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan ( $\Delta$ ) aktiva lancar (*current assets*) dikurangi kas dengan perubahan ( $\Delta$ ) hutang lancar (*current liabilities*) dikurangi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{it-1}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Langkah III : Menghitung nilai *nondiscretionary accruals total accruals* (NDA)

$$NDA_{it} = \beta_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it-1}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

Langkah IV : Menghitung nilai *discretionary current accruals*, yaitu *discretionary accruals* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$$

Keterangan :

TAC<sub>it</sub>= Total *accruals* perusahaan i pada periode t

N<sub>it</sub>= Laba bersih perusahaan i pada periode t

CFO<sub>it</sub>= Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t

A<sub>it-1</sub> = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta REV_t$ = Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

$\Delta REC_t$  = Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE<sub>t</sub>= Aset tetap (*property, plant and equipment*) perusahaan tahun t

DA<sub>it</sub>= *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

$NDA_{it}$  = *Non Discretionary Accruals* perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

$e$  = *error*

Menurut (Sulistyanto, 2008:165) secara empiris nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif, atau negative. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangan. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan peralatan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola kenaikan laba (*income increasing*) dan nilai negative menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Discretionary Accruals* merupakan komponen akrual yang timbul dari diskresi/keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.

### **2.1.8 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan penulis ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya. Pada umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti- peneliti tersebut telah dipublikasikan pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Arus Kas Bebas terhadap Manajemen Laba, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tabel Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri, & Vertari Sasmi (2019)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur periode 2013-2015	Menggunakan variabel independen yaitu Perencanaan Pajak dan Aset (Aktiva) Pajak Tangguhan. Selain itu, menggunakan variabel dependen yaitu manajemen laba	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Arus Kas Bebas	Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba
2.	Firstian Andrea Putri, Nera Marinda Machdar (2017)	Pengaruh Asimetri Informasi, Arus Kas Bebas dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba	Menggunakan variabel independen yaitu Arus Kas Bebas dan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Aset Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan arus kas bebas tidak memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak memiliki

					pengaruh terhadap manajemen laba.
3.	Reza Hangga Dewa Kumala Putra, Ketut Sunarta, & Haqi Fadillah (2019)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	Menggunakan variabel independen yaitu Perencanaan Pajak dan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Aset Pajak Tangguhan dan Arus Kas Bebas	Secara parsial perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian beban pajak tangguhan juga memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.
4.	Tutik Avrinia Wulansari (2019)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Industri Barang Konsumsi	Menggunakan variabel independen yaitu Perencanaan Pajak dan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Aset Pajak Tangguhan dan Arus Kas Bebas	Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
5.	Tan Rachel Kalinda dan Lilis	Dampak Perencanaan Pajak dan Aset Pajak	Menggunakan variabel independen yaitu	Pada penelitian ini tidak menggunakan	Perencanaan pajak memiliki pengaruh

	Setyowati (2021)	Tanggungan Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)	Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan. Selain itu, menggunakan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	variabel Arus Kas bebas	terhadap manajemen laba. Sedangkan aset pajak tanggungan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba
6.	Faqih & Sulistyowati (2021)	Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Industri Barang Konsumsi	Menggunakan variabel independen yaitu Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan. Selain itu, menggunakan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Arus Kas Bebas	Terdapat pengaruh antara perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan pada manajemen laba, sedangkan aset pajak tanggungan tidak memiliki pengaruh pada manajemen laba.
7.	Angelina Lorenzia & Riki Sanjaya (2022)	Pengaruh Arus Kas Bebas, Struktur Kepemilikan, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek	Menggunakan variabel independen yaitu Arus Kas Bebas dan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Aset Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak	Arus Kas Bebas dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba

		Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2019)			
8.	Vivi Adeyani Tandean, SE, Ak, M.Ak, CA (2019)	Pengaruh Arus Kas Bebas dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)	Menggunakan variabel independen yaitu Arus Kas Bebas dan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Aset Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak	Arus Kas Bebas memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan Tingkat Hutang Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.
9.	Hestin Agustina & Baharuddin Saga (2022)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Free Cash Flow Dan Financial Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020)	Menggunakan variabel independen yaitu Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) dan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Aset Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak	Beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, Free cash flow tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan Financial Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba
10.	Deni Sunaryo, Muhamad Suhaemi,	Pengaruh Faktor Good Corporate Governance	Menggunakan variabel independen yaitu Arus Kas	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Aset	Ukuran Komite Audit secara parsial tidak

	Marsella Fanni Sagita (2022)	dan <i>Free Cash Flow</i> terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Transportasi di Asia tenggara	Bebas (Free Cash Flow) dan variabel dependen yaitu Manajemen Laba	Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak	berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Dewan Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Kepemilikan Institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Kepemilikan Manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan Free Cash Flow secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
--	------------------------------	---	---	---------------------------------------	--

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Shafira Purnamasari Putri dan Chaidir Djohar (2023) dengan judul “Pengaruh



Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Arus Kas Bebas Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2021)” Variabel-variabel yang diteliti yaitu Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan dan Arus Kas Bebas sebagai variabel independen (bebas) dan Manajemen Laba sebagai variabel dependen (terikat). Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Unit analisis adalah perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan unit yang diobservasi laporan keuangan. Sampel penelitian ini adalah 47 perusahaan sektor perbankan yang diambil sesuai kriteria dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba dan arus kas bebas (*free cash flow*) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai sektor perusahaan yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya unit analisis yang diteliti adalah perusahaan sektor perbankan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih meneliti perusahaan sektor *property and real estate*. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *property and real estate* sebagai subjek penelitian dikarenakan Sektor *property and real estate* merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam bidang perekonomian dan pembangunan nasional. Selain itu, sektor ini dapat menjadi indikator dalam menilai pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Prospek bisnis *sektor property and real estate* di Indonesia juga memiliki masa depan yang cerah dengan

masuknya berbagai kerja sama antara investor global dengan pegembang lokal. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ketua Umum DPP REI dalam seminar Asean Super Blok Forum, nilai proyek *real estate* dari investor asing di Indonesia mencapai USD603 juta pada kuartal pertama tahun 2020 diikuti dengan adanya 490 proyek yang berjalan pada kuartal pertama tahun tersebut (medcom.id, 2020). Sektor property dan real estate membutuhkan dana yang cukup besar dari investor maupun kreditor untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Selain itu pada penelitian tersebut menggunakan variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, kepemilikan manajerial dan arus kas bebas (*free cash flow*) yang digunakan sebagai bahan penelitian. Sedangkan pada penelitian ini hanya meneliti variabel Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Arus Kas Bebas sebagai variabel independen.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba**

Aset pajak tangguhan terjadi karena adanya koreksi positif yang mengakibatkan laba perusahaan atau laba komersial lebih kecil dibandingkan dengan laba menurut fiskal. Sehingga perusahaan membayar pajak periode tertentu lebih besar daripada pembayaran pajak periode mendatang. Karena pembayaran pajak periode mendatang lebih kecil atau lebih hemat berarti laba perusahaan yang dilaporkan akan menjadi lebih besar (Achyani dan Lestari, 2019). Aset Pajak Tangguhan terjadi apabila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal akibat

perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang. (Suranggane, 2007).

Aset pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut Yulianti (2005). Timuriana dan Muhamad (2015) mengemukakan bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode sekarang dialihkan pada periode mendatang dengan demikian laba perusahaan pun akan meningkat karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil. Hal ini merupakan upaya manajemen untuk mencapai laba yang besar untuk memperoleh berbagai keuntungan untuk dirinya sendiri yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan Suranggane (2007), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Apabila aset pajak tangguhan mengalami kenaikan maka manajemen laba pun akan mengalami kenaikan.

### **2.2.2 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba**

Perencanaan pajak merupakan tindakan melakukan rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga utang pajak yang ditanggung lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, namun masih dalam aturan perpajakan sehingga perencanaan pajak dapat dikatakan legal (Negara & Suputra, 2017). Hal ini dilakukan agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit sehingga perusahaan memiliki kas lebih banyak untuk membiayai kegiatan operasional, mengembangkan usaha, maupun membuka lowongan baru (Achyani & Lestari, 2019).

Menurut Suandy (2016) upaya untuk meminimalkan beban pajak sering disebut dengan perencanaan pajak, karena hal itu timbul keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin. Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Sulistiyanto (2008:169) menyebutkan upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak yaitu dengan mengatur besar kecilnya pendapatan dan biaya sekaligus. Pendapatan diatur supaya lebih kecil dibandingkan pendapatan sesungguhnya, sedangkan biaya diatur menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya, yang akan mempengaruhi arus kas operasi. Kondisi ini menggambarkan keterkaitan manajemen laba dengan pola menurunkan laba (*income decreasing earnings management*). Dengan laba bersih yang rendah, maka pajak yang dikenakan kepada perusahaan juga rendah. Tindakan ini menunjukkan bahwa semakin besar perencanaan pajak dilakukan manajemen, semakin tinggi manajemen laba terjadi.

### **2.2.3 Pengaruh Arus Kas Bebas Terhadap Manajemen Laba**

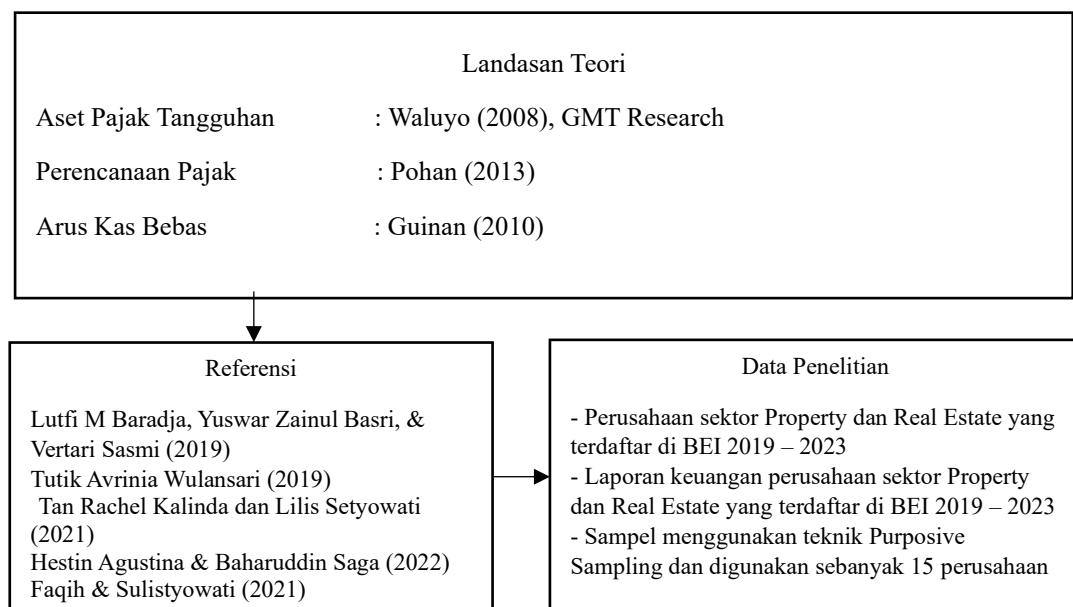
Brigham & Hoston (2007) dalam (Rosit, Mujiyati, & Setiawati, 2019) mendefinisikan bahwa arus kas bebas berarti arus kas yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh investor (pemegang saham dan pemilik utang) setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk-

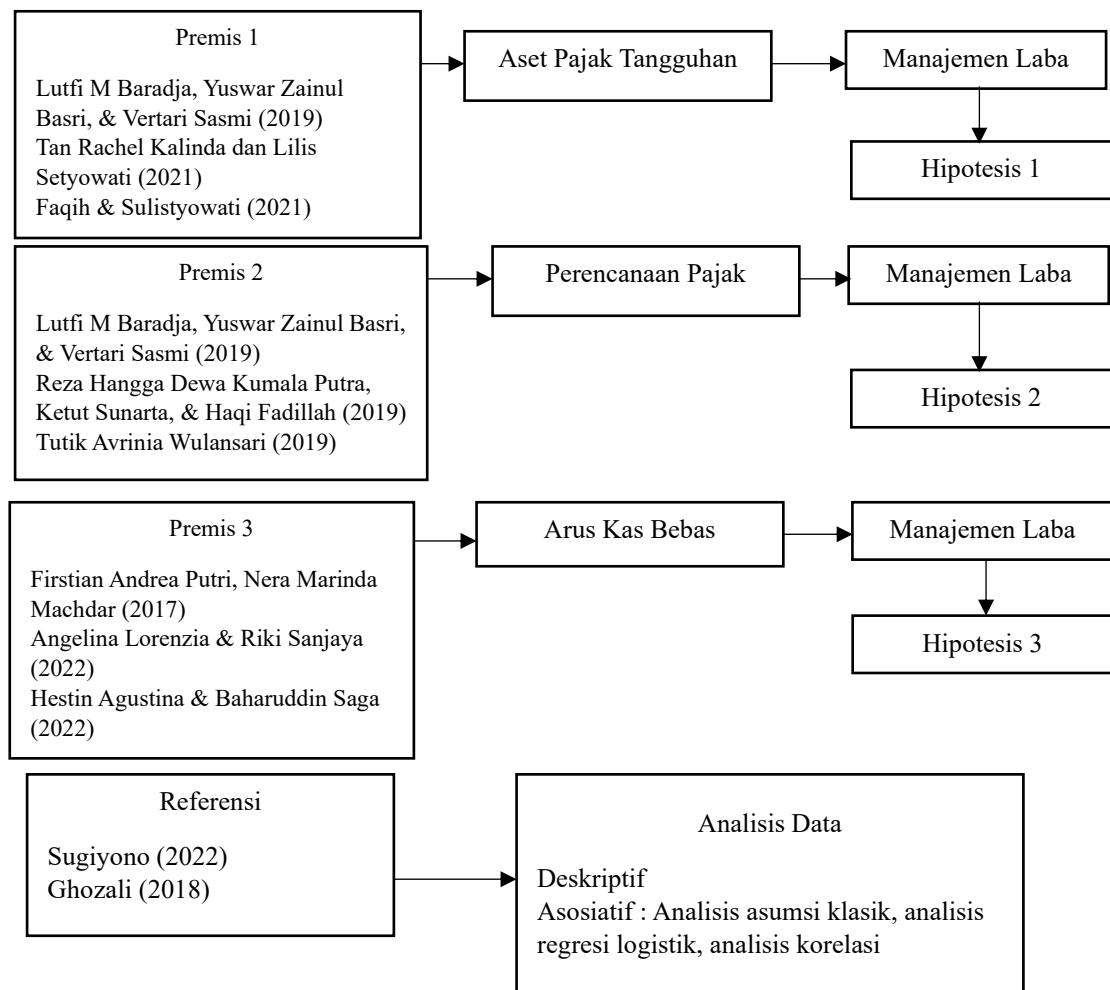
produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan.

Arus kas bebas atau *free cash flow* yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajibannya seperti membayar hutang dan lain-lain. Hal ini dapat menggambarkan jika perusahaan dalam keadaan sehat yang menjadikan nilai tambah dimata pemegang saham, sehingga manajemen perusahaan akan berusaha mengoptimalkan kas bebas (Putri & Rachmawati, 2019).

Hardirmaningrum et al., (2021) menyatakan perseroan yang mempunyai kas bebas yang besar nilainya pada laporan keuangan, tanpa dilakukannya pengawasan yang benar maka akan mudah terjadinya resiko oleh para manajemen untuk tidak menggunakan secara benar saldo kas bebas yang pada laporan keuangan secara sesuai.

Berdasarkan pemaparan diatas maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:64) menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiric.”

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dibutuhkan pengujian hipotesis untuk mengetahui adanya pengaruh keterkaitan antara variabel independent dengan variabel dependen. Maka diasumsikan jawaban sementara penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Aset Pajak Tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba

H2 : Perencanaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba

H3 : Arus Kas Bebas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba